

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT PLN (PERSERO) TERHADAP WANPRESTASI PENYEDIA BARANG/JASA BERBENTUK KONSORSIUM YANG MENGALAMI PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA KONSORSIUM

### INTISARI

Oleh:  
**Bintang Yessi Dara<sup>1</sup> dan Sulistiowati<sup>2</sup>**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan PT Nincec Multi Dimensi dalam memenuhi kewajibannya kepada PT PLN (Persero) dan perlindungan hukum bagi PT PLN (Persero) selaku kreditur atas kewajiban anggota konsorsium yang terlambat melaksanakan kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung dari responden dari pejabat terkait di lingkungan penelitian di PT PLN (Persero). Data sekunder di dapat melalui penelitian kepustakaan. Setelah melakukan penelitian secara menyeluruh akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulanm pertama faktor-faktor penyebab keterlambatan PT Nincec Multi Dimensi dalam memenuhi kewajibannya kepada PT PLN (Persero) disebabkan kondisi pailit sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 6 Mei 2014 dan adanya gugatan Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan obyek perkara jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa bank. Kedua, perlindungan hukum yang diambil PT PLN (Persero) adalah langkah represif yaitu dengan memberikan Sanksi Daftar Hitam (*Blacklist*) kepada bank penerbit jaminan tersebut.

Kata kunci: perlindungan hukum, konsorsium, perserikatan perdata.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**LEGAL PROTECTION FOR PT PLN (PERSERO)  
ON DEFAULT OF SUPPLIER FORM OF CONSORTIUM  
THAT EXPERIENCES CHANGE OF CONSORTIUM MEMBERS**

**ABSTRACT**

**By:**  
**Bintang Yessi Dara<sup>3</sup> dan Sulistiowati<sup>4</sup>**

*This study aims to determine and analyse the factors that cause delays in PT Nincec Multi Dimensi in fulfilling its obligations to PT PLN (Persero) and legal protection for PT PLN (Persero) as creditors for the obligations of consortium members who are late in carrying out their obligations.*

*The research used a normative empirical approach, by doing legal research that examines the implementation of legal provisions. This research was conducted to obtain primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from respondents from related officials at PT PLN (Persero). Secondary data obtained through library research. After conducting a thorough research, conclusions will be drawn by using inductive methods.*

*Based on the results of the research and analyses, the first conclusion is the factors causing the delay in PT Nincec Multi Dimensi in fulfilling its obligations to PT PLN (Persero) were due to bankruptcy as the Court Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst on May 6, 2014 and the claim of PT Nincec Multi Dimensi (In Bankruptcy) Curator to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten with the object of the law suit is bank guarantee as performance bond. Second, legal protection taken by PT I (Persero) is a repressive step, namely by giving a blacklist sanction to the issuer bank of the guarantee.*

*Keywords: legal protection, consortium, civil union*

---

<sup>3</sup> Student of Master of Law Jakarta Collage, Faculty of Law of Gadjah Mada University.

<sup>4</sup> Lecturer of Master of Law Jakarta Collage, Faculty of Law of Gadjah Mada University.